

# **PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

**Ratnaningsih SY  
Cholis Hidayati\***

## **Abstraksi**

Dalam sebuah pemerintahan perusahaan tentu banyak sekali pihak-pihak yang berhubungan. Kesamaan visi dan misi menjadi hal yang sangat penting untuk tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Informasi yang tepat, akurat dan terpercaya menjadi tolok ukur dalam berbagai pengambilan keputusan perusahaan dan salah satu cara menghindari dari informasi asimetri antara pemilik dan pengelola. Untuk menghindari terjadinya informasi asimetri dalam perusahaan dibutuhkan suatu konsep yang disebut dengan tata kelola perusahaan atau *good corporate governance*. Tujuan dari konsep ini adalah menjadikan perusahaan menjadi lebih baik dan sehat dengan kelima prinsipnya, yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh penerapan *corporate governance* yang diukur dengan proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan keberadaan komite audit terhadap tindakan manajemen laba yang dihitung dengan menggunakan *discretionary accruals* model Jones. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Metode pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* dan didapatkan 22 perusahaan perbankan sebagai sampel. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel independen tidak terbukti berpengaruh terhadap pengurangan praktik manajemen laba. Hal ini dikarenakan penerapan *good corporate governance* belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

**Kata kunci** : Perbankan, *corporate governance*, Manajemen laba

## **1. PENDAHULUAN**

Informasi merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi banyak pihak. Tanpa informasi banyak orang yang akan mengalami kebingungan dan ketidak tahuan terhadap suatu hal dan bagaimana harus mengambil keputusan. Oleh sebab itu informasi merupakan hal yang sangat penting terutama bagi pihak-pihak yang mengandalkan informasi sebagai tolok ukur untuk pengambilan sebuah keputusan.

Bagi perusahaan, informasi yang terpenting adalah sebuah laporan. Karena dari laporan itulah manajemen dapat melihat bagaimana kondisi perusahaan dan kemudian

---

\* Ratnaningsih SY adalah dosen tetap pada Univertitas 17 Agustus 1945 Fakultas Ekonomi  
Cholis Hidayati adalah dosen tetap pada Univertitas 17 Agustus 1945 Fakultas Ekonomi

menentukan keputusan seperti apa yang paling tepat untuk diambil. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak baik bagi perusahaan tapi berbanding terbalik apabila manajemen mengambil keputusan yang salah.

Informasi yang sangat mendukung berkembang atau tidaknya sebuah perusahaan adalah laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, akan terlihat bagaimana perusahaan itu mengalami pertumbuhan atau malah mengalami penurunan. Salah satu kriteria yang terpenting dalam penyampaian sebuah laporan keuangan adalah *relevan* dan *realible*. Informasi akuntansi dikatakan *relevan* apabila dapat mempengaruhi keputusan dengan menguatkan atau mengubah pengharapan para pengambil keputusan dan informasi tersebut, dan dikatakan *realible* apabila dapat dipercaya dan menyebabkan pemakai informasi tergantung dengan informasi tersebut.

Berbagai masalah dapat timbul akibat tidak transparansinya sebuah laporan keuangan. Seperti misalnya masalah agensi yang begitu menarik perhatian dari para peneliti di bidang akuntansi keuangan (Fuad, 2005). Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara *shareholder* dan manajer yang tidak menemukan titik temu atas utilitas maksimal di antara mereka. Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajer selaku *agent* dengan pemilik sebagai *principal* perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). *Principal* memberikan kewenangan dan otoritas kepada *agent* untuk menjalankan perusahaan demi kepentingan *principal*. Sedangkan manajer sebagai *agent*, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik.

Namun di sisi yang lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan oleh manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, karena manajer cenderung untuk melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya. Keadaan yang seperti inilah yang dikenal dengan informasi asimetri yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan praktik manajemen laba atau *earning management* (Richardson, 1998).

Informasi asimetri membuka peluang bagi manajer untuk bertindak oportunistis demi keuntungan pribadinya (Ujiyanto, 2007). Informasi asimetri dapat diminimalisir dengan cara transparansi dalam penyampaian laporan keuangan terhadap *principal*. Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk internal manajemen perusahaan itu sendiri. Sebenarnya, pihak yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan adalah para pengguna eksternal atau pihak di luar manajemen. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal karena pengguna ini berada

dalam kondisi yang paling besar ketidak pastiannya (Ali, 2004). Para pengguna internal memiliki kontak langsung dengan entitas perusahaannya dan mengetahui setiap peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal.

Praktik manajemen laba telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang begitu besar. Deteksi merupakan tindakan awal yang dilakukan terhadap adanya praktik manipulasi atas laporan keuangan (Gideon, 2005). Salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus ini adalah karena lemahnya penerapan praktik *corporate governance* di Indonesia. Mekanisme *corporate governance* dicerminkan dari adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris independen, dan komite audit yang ditengarai mampu menghambat aktivitas manajemen laba. *Corporate governance* diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemilik, demi terciptanya kinerja perusahaan yang bersih dan terlindunginya kepemilikan pemilik. Bapepam mengharuskan perusahaan tercatat menerapkan *good corporate governance* melalui surat edaran dengan nomor SE-03/PM/2000.

*Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk pemegang sahamnya. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks, risiko kegiatan usaha perbankan pun kian beragam sehingga secara tidak langsung menuntut praktik tata kelola perbankan yang sehat. Penerapan prinsip *good corporate governance* selain meningkatkan daya saing juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan *good corporate governance* menjadi suatu keniscayaan mengingat sektor perbankan mengelola dana publik, dimana pengendalian sangat diperlukan untuk memperkecil risiko. Risiko dalam usaha atau bisnis perbankan adalah sesuatu yang alamiah dan selalu akan dihadapi oleh bank. Meniadakan sama sekali risiko tersebut juga merupakan hal yang tidak realistis. Sikap proporsional terhadap risiko di satu pihak dan kebutuhan akan likuiditas serta kepercayaan terhadap perbankan di lain pihak dapat terjaga dengan baik.

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip *good corporate governance* adalah bagian terpenting dalam setiap transaksi perbankan. Bank Indonesia selaku regulator lembaga perbankan telah mengeluarkan banyak peraturan yang terkait langsung dengan upaya penerapan *good corporate governance*, salah satunya adalah dengan mengeluarkan peraturan No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum yang selanjutnya diubah dengan Peraturan No.

8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank-bank umum (FCGI, 2008).

Konsep *good corporate governance* diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memonitor kinerja bank dan untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkannya.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahannya adalah apakah ada “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pengamatan tahun 2009 - 2011”

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*). (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan (2005) yaitu hubungan antara *principal* dan *agen*. *Principal* mempekerjakan *agen* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agen*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agen* mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Ujijanto dan Bambang (2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

### **Informasi Asimetri**

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi (hasil usaha) perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007). Laporan keuangan sangat diperlukan oleh setiap perusahaan untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran dari usahanya. Selain itu, laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut.

Salah satu kendala yang akan muncul antara *agent* dan *principal* adalah adanya informasi asimetri (*information asymetry*). Informasi asimetri adalah suatu keadaan dimana *agent* mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan *principal*. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada *agent*, menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya. Informasi asimetri ini mengakibatkan terjadinya *moral hazard* berupa usaha manajemen untuk melakukan *earnings management* (Rahmawati, dkk. 2006).

### **Teori Bid-Ask Spread**

Menurut Wikipedia sebagai ensiklopedia bebas, *Bid-ask Spread* adalah selisih antara harga beli tertinggi (*bid*) yang menyebabkan investor bersedia untuk membeli saham tertentu dengan harga jual (*ask*) terendah yang menyebabkan investor bersedia untuk menjual sahamnya. *Bid-ask spread* yang merupakan fungsi dari *transaction cost* mempengaruhi perdagangan dan menyebabkan investor mengharapkan untuk menahan lebih panjang atau pendek asset yang memiliki biaya transaksi yang lebih tinggi atau rendah.

Penggunaan *bid-ask spread* sebagai proksi dari informasi asimetri menurut Komalasari (2001) dikarenakan dalam mekanisme pasar modal, pelaku pasar modal juga menghadapi masalah keagenan. Partisipan pasar saling berinteraksi di pasar modal guna mewujudkan tujuannya yaitu membeli atau menjual sekuritasnya, sehingga aktivitas yang mereka lakukan dipengaruhi oleh informasi yang diterima baik secara langsung (laporan publik) maupun tidak langsung (*insider trading*). Dealers atau *market-makers* memiliki daya pikir terbatas terhadap persepsi masa depan dan menghadapi potensi kerugian ketika berhadapan dengan *informed traders*. Hal inilah yang menimbulkan *adverse selection* yang mendorong dealers untuk menutupi kerugian dari pedagang terinformasi dengan meningkatkan *spread*-nya terhadap pedagang *likuiq*.

### **Corporate Governance**

*Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung

jawabnya (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*(FCGI), 2003). *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui *supervise* atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan kerangka pada peraturan.

*Corporate governance* merupakan salah satu konsep yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Watts (2003), menyatakan bahwa salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah *corporate governance*.

Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Dengan kata lain *corporate governance* diarahkan untuk mengurangi informasi asimetri antara *principal* dan *agent* yang pada akhirnya dapat menurunkan tindakan manajemen laba (Ujiyanto dan Bambang, 2007). Hingga saat ini masih ditemui definisi yang bermacam-macam tentang *Good Corporate Governance* atau GCG. Namun umumnya mempunyai maksud dan pengertian yang sama.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* atau FCGI (2000) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee*, yaitu: "*seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.*" Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

### **Prinsip-prinsip Corporate Governance**

Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok *Good Corporate*

*Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah :

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independency* (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

### **Kepemilikan Institusional**

Menurut Siregar dan Siddharta (2005), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank,

dana pensiun, dan *investment banking*. Kepemilikan institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Kepemilikan institusional ini akan dipandang sebagai investor institusional dalam dua pandangan, yaitu sebagai pemilik sementara (*transfer owner*) dan investor yang berpengalaman (*sophisticated*).

Kepemilikan institusional dapat mengurangi tingkat insentif manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri melalui pengawasan yang intens sehingga dapat menekan perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Investor institusional dianggap *sophisticated investors* yang tidak mudah “dibodohi” oleh tindakan manajemen (Midiastuty dan Mas`ud, 2003).

### **Kepemilikan Manajemen**

Kepemilikan manajemen adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Dengan adanya kepemilikan manajemen, diharapkan dapat menekan adanya praktik manajemen laba. Kepemilikan manajemen dapat menyelaskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan (Boediono:2005)

### **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris dalam KNKG (2006) diartikan sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

### **Komite Audit**

Dalam FCGI (2000) dinyatakan bahwa Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sebagai contoh, Komite Audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi atau keuangan. Komite Audit sesuai dengan Kep.29/PM/2004, didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan.

Komite audit merupakan suatu komponen yang baru dalam perusahaan yang memiliki peranan sangat vital sebagai sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam hal pengendalian internal perusahaan. Menurut Susiana dan Herawaty (2007), adapun yang menjadi tujuan dari adanya komite audit dalam suatu perusahaan adalah:

1. Memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan.
2. Memberikan kepastian bahwa pengendalian internal perusahaan telah memadai.

3. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti kemungkinan penyimpangan material dalam bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor eksternal yang akan melakukan audit di perusahaan.

Sedangkan sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tertulis tugas dari komite audit adalah :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

### **Komisaris Independen**

Komisaris independen memiliki tanggung jawab terhadap kualitas informasi dari laporan keuangan. Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (2004), komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

### **Manajemen Laba**

Dalam hubungannya dengan keagenan, manajer memiliki informasi asimetri terhadap pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Informasi asimetri terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak

dan lebih cepat dibandingkan dengan pihak eksternal. Hal ini dapat memberi kesempatan kepada manajer untuk memanipulasi laporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya.

Manajemen laba merupakan masalah keagenan yang seringkali dipicu oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Manajer melakukan manipulasi laba melalui manajemen laba agar laba nampak sebagaimana yang diharapkan.

### Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka hipotesa yang dapat dilakukan peneliti adalah;

H<sub>1</sub> : komposisi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap hubungan antara informasi asimetri dengan terjadinya praktik manajemen laba

H<sub>2</sub> : ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap hubungan antara informasi asimetri dengan terjadinya praktik manajemen laba

H<sub>3</sub> : ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap hubungan antara informasi asimetri dengan terjadinya praktik manajemen laba

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan perbankan *go public* dan dipublikasikan oleh pusat referensi pasar modal atau PRPM yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Data laporan keuangan yang digunakan selama Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 perusahaan tersebut adalah :

Tabel.1

Daftar Seleksi Sample Perusahaan Perbankan

No.	Kode	Nama Bank
1.	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk.
2.	BABP	Bank ICB Bumiputera, Tbk.
3.	BACA	Bank Capital Indonesia, Tbk.
4.	BAEK	Bank Ekonomi Raharja, Tbk.
5.	BBCA	Bank Central Asia, Tbk.
6.	BBKP	Bank Bukopin, Tbk.
7.	BBMI	Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
8.	BBNI	Bank Negara Indonesia, Tbk.
9.	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.

10.	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
11.	BBRK	Bank Pembangunan Riau Kepulauan, Tbk.
12.	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
13.	BCIC	Bank Mutiara, Tbk.
14.	BDMN	Bank Danamon Indonesia, Tbk.
15.	BEKS	Bank Pundi Indonesia, Tbk.
16.	BJBR	Bank Jawa Barat, Tbk.
17.	BKSW	Bank QNB Kesawan, Tbk.
18.	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.
19.	BNBA	Bank Bumi Arta, Tbk.
20.	BNGA	Bank CIMB Niaga, Tbk.
21.	BNII	Bank International Indonesia, Tbk.
22.	BNLI	Bank Permata, Tbk.
23.	BSIM	Bank Sinarmas, Tbk.
24.	BSWD	Bank of India Indonesia, Tbk.
25.	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.
26.	BVIC	Bank Victoria International, Tbk.
27.	INPC	Bank Artha Graha International, Tbk.
28.	MAYA	Bank Mayapada International, Tbk.
29.	MCOR	Bank Windu Kentjana International, Tbk.
30.	MEGA	Bank Mega, Tbk.
31.	NISP	Bank OCBC NISP, Tbk.
32.	PNBN	Bank Pan Indonesia, Tbk.
33.	SDRA	Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk.

Sumber: Bursa Efek Indonesia, diolah oleh penulis

### Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### Variabel Dependen

Yang menjadi variabel terikat atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tindakan manajemen yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran individu atau untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Penggunaan *disrectionary accruals* sebagai proksi manajemen laba dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model* (Dechow *et al.*, 1995), model tersebut dituliskan sebagai berikut:

$$TA_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Nilai *total accrual* (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai berikut:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left( \frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta Rev_t}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_t}{A_{it-1}} \right) + e$$

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai *non discretionary accruals* (NDA) dapat dihitung dengan rumus :

$$NDA_{it} = \beta_1 \left( \frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta Rev_t}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rev_{t-1}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_t}{A_{it-1}} \right)$$

Selanjutnya *discretionary accrual* (DA) dapat dihitung sebagai berikut:

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan :

- $DA_{it}$  = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t
- $NDA_{it}$  = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t
- $TA_{it}$  = Total akrual perusahaan i pada periode ke t
- $N_{it}$  = Laba bersih perusahaan i pada periode ke -t
- $CFO_{it}$  = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t
- $A_{it-1}$  = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t – 1
- $\Delta Rev_t$  = perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t
- $PPE_t$  = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t
- $\Delta Rec_t$  = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t
- $e$  = *error terms*

Apabila besarnya  $DA = 0$  maka diindikasikan perusahaan tidak melakukan manajemen laba. Jika DA bernilai positif berarti terdapat indikasi perusahaan tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menaikkan laba. Jika DA bernilai negative maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba.

### Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi keberadaan Y atau bisa juga disebut dengan variabel bebas.

- a. Proporsi komisaris Independen adalah persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel. (X1)
- b. Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah total anggota dewan komisaris perusahaan. (X2)
- c. Keberadaan Komite Audit merupakan variabel dummy, jika perusahaan sampel memiliki komite audit maka akan diberi nilai 1, jika perusahaan sampel tidak memiliki komite audit maka akan diberi nilai 0. (X3)

### Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan publik yang ada di Indonesia pada tahun 2009 sampai 2011.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang memiliki kriteria tertentu. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana pengambilan sampel perusahaan dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2002) dengan tujuan untuk mendapatkan sampel representative sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan termasuk perusahaan perbankan yang sudah *go public* terdaftar di BEI selama periode 2009 sampai dengan 2011
2. Data laporan keuangan perusahaan tersedia berturut-turut untuk tahun pelaporan dari 2009 sampai dengan 2011 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp)
3. Perusahaan sampel tersebut mempublikasikan laporan keuangan auditor dengan menggunakan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
4. Data harga saham tersedia selama periode pengamatan
5. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 31 Desember 2009 - 2011), baik data yang mengenai dewan komisaris dan komisaris independen serta data yang diperlukan untuk mendeteksi manajemen laba, dan data yang berkaitan dengan *corporate governance* perusahaan.

#### 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

##### Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, minimum, maksimum dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti. Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik (*normality, multicollinearity, autokorelasi dan heterokedastisitas*).

##### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap manajemen laba ( $H_1, H_2, H_3$ ) digunakan alat analisis regresi berganda. Model persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut,

$$DA = \beta_0 + \beta_1PKI + \beta_2UDK + \beta_3KKA + e$$

Keterangan:

DA	= <i>Discretionary Accruals</i>
PKI	= Proporsi Komisaris Independen
UDK	= Ukuran Dewan Komisaris
KKA	= Kepemilikan Komite Audit
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_3$	= Koefisien Regresi
e	= <i>error terms</i>

## Uji Hipotesis

Dari tabel.1, ada 11 lembaga keuangan yang tercatat sebagai anggota bursa, namun tidak memenuhi kriteria sampel. Dan ada 22 perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini. Terdapat tiga variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan komite audit. Sedangkan variabel terikat adalah manajemen laba yang diprosikan dengan *discretionary accrual*. Tabel.2, tabel 3 dan tabel.4. DA yang dimaksudkan adalah *discretionary accruals*. PKI merupakan proporsi komisaris independen, sedangkan UDK adalah ukuran dewan komisaris serta KKA merupakan kepemilikan komite audit.

Tabel.2

### Statistik Deskriptif Tahun 2009 Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
DA	22	-,1502	,72677	-1,28	2,93
Pki	22	,5936	,16296	,33	1,00
UDK	22	,5342	,16220	,00	1,00
KKA	22	1,0000	,00000	1,00	1,00

Dari hasil tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

- Rata-rata manajemen laba yang *diprosi* ke dalam *discretionary accrual* adalah -0,1502 dengan hasil standar deviasi 0,72677 dengan jumlah observasi n adalah 22. Dari seluruh jumlah sampel didapatkan nilai minimumnya -1,28 dan nilai maximumnya 2,93.
- Rata-rata proporsi komisaris independen adalah 0,5342 dengan hasil standar deviasi 0,16296 dengan jumlah observasi n adalah 22. Dari seluruh jumlah sampel didapatkan nilai minimumnya 0,33 dan nilai maximumnya 1,00.
- Rata-rata proporsi komisaris independen adalah 5,2273 dengan hasil standar deviasi 0,16220 dengan jumlah observasi n adalah 22. Dari seluruh jumlah sampel didapatkan nilai minimumnya 0,00 dan nilai maximumnya 1,00.
- Rata-rata kepemilikan komite audit adalah 1 dengan standar deviasi 0 dan jumlah observasi n adalah 22. Untuk komite audit, merupakan variabel *dummy*, apabila perusahaan memiliki komite audit maka akan diberi nilai 1, sedangkan apabila perusahaan tidak memiliki komite audit maka akan diberi nilai 0.

Tabel.3  
 Statistik Deskriptif Tahun 2010  
**Descriptive Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
DA	22	-,2628	,08870	-,50	-,16
Pki	22	,5342	,16220	,00	1,00
UDK	22	5,0000	1,85164	2,00	8,00
KKA	22	1,0000	,00000	1,00	1,00

Dari hasil tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

- Rata-rata manajemen laba yang *diprosi* ke dalam *discretionary accrual* adalah -0,2628 dengan hasil standar deviasi 0,08870 dengan jumlah observasi n adalah 22. Dari seluruh jumlah sampel didapatkan nilai minimumnya -0,50 dan nilai maximumnya -0,16.
- Rata-rata proporsi komisaris independen adalah 0,5342 dengan hasil standar deviasi 0,16220 dengan jumlah observasi n adalah 22. Dari seluruh jumlah sampel didapatkan nilai minimumnya 0,00 dan nilai maximumnya 0,10.
- Rata-rata proporsi komisaris independen adalah 5,0 dengan hasil standar deviasi 1,85164 dengan jumlah observasi n adalah 22. Dari seluruh jumlah sampel didapatkan nilai minimumnya 2,00 dan nilai maximumnya 8,00.
- Rata-rata kepemilikan komite audit adalah 1 dengan standar deviasi 0 dan jumlah observasi n adalah 22. Untuk komite audit, merupakan variabel *dummy*, apabila perusahaan memiliki komite audit maka akan diberi nilai 1, sedangkan apabila perusahaan tidak memiliki komite audit maka akan diberi nilai 0.

Tabel.4  
 Statistik Deskriptif Tahun 2011  
**Descriptive Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
DA	22	-,2045	,06146	-,35	-,09
Pki	22	,5565	,09732	,33	,80
UDK	22	5,2273	1,71636	3,00	8,00
KKA	22	1,0000	,00000	1,00	1,00

Dari hasil tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

- Rata-rata manajemen laba yang *diprosi* ke dalam *discretionary accrual* adalah -0,2045 dengan hasil standar deviasi 0,06146 dengan jumlah observasi n adalah 22. Dari seluruh jumlah sampel didapatkan nilai minimumnya -0,35 dan nilai maximumnya -0,09.

- b. Rata-rata proporsi komisaris independen adalah 0,5565 dengan hasil standar deviasi 0,09732 dengan jumlah observasi  $n$  adalah 22. Dari seluruh jumlah sampel didapatkan nilai minimumnya 0,33 dan nilai maximumnya 0,80.
- c. Rata-rata proporsi komisaris independen adalah 5,2273 dengan hasil standar deviasi 1,71636 dengan jumlah observasi  $n$  adalah 22. Dari seluruh jumlah sampel didapatkan nilai minimumnya 3,00 dan nilai maximumnya 8,00.
- d. Rata-rata kepemilikan komite audit adalah 1 dengan standar deviasi 0 dan jumlah observasi  $n$  adalah 22. Untuk komite audit, merupakan variabel *dummy*, apabila perusahaan memiliki komite audit maka akan diberi nilai 1, sedangkan apabila perusahaan tidak memiliki komite audit maka akan diberi nilai 0.

Dari hasil statistik deskriptif dapat diketahui bahwa mean dari proporsi komisaris independen apabila dilihat dalam bentuk persentase adalah 59% pada tahun 2009, 53% pada tahun 2010 dan 56% pada tahun 2011, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan sampel telah memenuhi syarat dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bahwa jumlah komisaris independen paling kurang 50% dari jumlah total dewan komisaris.

Ukuran dewan komisaris memiliki mean 4.77 pada tahun 2009, 5 pada tahun 2010 dan 5,23 pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwa jumlah total dewan komisaris yang dimiliki masing-masing perusahaan sample telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu paling kurang tiga orang atau sama dengan jumlah total dewan direksi. Dewan komisaris dari masing-masing perusahaan sample terus menunjukkan peningkatannya dari tahun ke tahun, terlihat dari semakin tingginya rata-rata ukuran dewan komisaris.

Variabel keberadaan komite audit memiliki mean 1, artinya perusahaan telah memiliki komite audit seluruhnya dari total perusahaan sample yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sample telah memiliki komite audit dan telah melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia.

Mean dari manajemen laba, yaitu *discretionary accrual* adalah -0.16 pada tahun 2009, -0,26 pada tahun 2010 dan -0,21 pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan tingkat manajemen laba yang tinggi, artinya keseluruhan perusahaan sample melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba.

#### **Uji Asumsi Klasik; Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian

normalitas dalam pengujian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Penentuan normal atau tidaknya suatu distribusi data ditentukan berdasarkan taraf signifikansi hasil hitung. Jika taraf signifikansi  $> 0,05$  maka data diinterpretasikan terdistribusi normal, dan sebaliknya, jika taraf signifikansi hasil hitung  $< 0,05$  maka diinterpretasikan bahwa data tidak terdistribusi secara normal.

Tabel 5  
Uji Normalitas Tahun 2009  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		DA	Pki	UDK	KKA
N		22	22	22	22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,1502	,5936	,5342	1,0000
	Std. Deviation	,72677	,16296	,16220	,00000 <sup>c</sup>
Most Extreme Differences	Absolute	,439	,236	,371	
	Positive	,439	,236	,252	
	Negative	-,292	-,147	-,371	
Kolmogorov-Smirnov Z		2,057	1,107	1,740	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000	,173	,005	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 6  
Uji Normalitas Tahun 2010  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		DA	Pki	UDK	KKA
N		22	22	22	22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,2628	,5342	5,0000	1,0000
	Std. Deviation	,08870	,16220	1,85164	,00000 <sup>c</sup>
Most Extreme Differences	Absolute	,156	,371	,160	
	Positive	,114	,252	,160	
	Negative	-,156	-,371	-,133	
Kolmogorov-Smirnov Z		,732	1,740	,750	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,658	,005	,627	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 7  
Uji Normalitas Tahun 2011  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		DA	Pki	UDK	KKA
N		22	22	22	22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,2045	,5565	5,2273	1,0000
	Std. Deviation	,06146	,09732	1,71636	,00000 <sup>c</sup>
Most Extreme Differences	Absolute	,117	,265	,130	
	Positive	,084	,265	,130	
	Negative	-,117	-,235	-,128	
Kolmogorov-Smirnov Z		,548	1,241	,610	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,925	,092	,851	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil penghitungan terhadap uji *one sample kolmogorov-Smirnov* terlihat bahwa selama tiga tahun berturut-turut penyebaran datanya bersifat normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan memplotkan grafik antara SRESID dengan ZPRED di mana gangguan heteroskedastisitas akan tampak dengan adanya pola tertentu pada grafik. Pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Glejser*. Caranya dengan melihat nilai probabilitas > 0,05, sehingga tidak terkena heteroskedastisitas.

Tabel 8  
Uji Heteroskedastisitas Tahun 2009  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 Constant	-,602	,735		-,818	,423
Pki	,084	1,045	,019	,080	,937
UDK	,752	1,050	,168	,717	,482
KKA	-3,418	1,605	-,458	-2,130	,047

a. Dependent Variable: DA

Dari data di atas terlihat bahwa pada semua variabel tidak terkena heteroskedastisitas.

Tabel.9  
Uji Heteroskedastisitas Tahun 2010  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 Constant	-,455	,058		-7,864	,000
Pki	,024	,083	,044	,288	,777
UDK	,036	,007	,747	4,921	,000

a. Dependent Variable: DA

Dari data di atas terlihat bahwa pada variabel bebas UDK (ukuran dewan komisaris terkena heteroskedastisitas. Begitu pula dengan variabel dependen. Hanya variabel independen Pki saja yang tidak terkena heteroskedastisitas

Tabel.10  
Uji Heteroskedastisitas Tahun 2011  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,279	,089		-3,134	,005
Pki	-,043	,126	-,068	-,343	,735
UDK	,019	,007	,528	2,644	,016

a. Dependent Variable: DA

Dari data di atas terlihat bahwa pada masing-masing variabel bebas tidak terkena heteroskedastisitas, sedangkan variabel dependenlah yang terkena heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana faktor pengganggu (*error term*) pada periode tertentu berkorelasi dengan faktor pengganggu pada periode lain. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti data *time series*) atau ruang (seperti data *cross sectional*). Dari hasil perhitungan data pada tahun 2009 terlihat hasil dari DW adalah 1,991. Dari hasil tersebut termasuk dalam jenis tidak ada autokorelasi. Dari hasil perhitungan data pada tahun 2010 terlihat hasil dari DW adalah 2,777. Dari hasil tersebut termasuk dalam jenis ada autokorelasi negatif. Dari hasil perhitungan data pada tahun 2011 terlihat hasil dari DW adalah 1,498. Dari hasil tersebut termasuk dalam jenis ada autokorelasi positif.

### Uji Multikolinearitas

Salah satu asumsi regresi linier klasik adalah tidak adanya multikolinearitas sempurna (*no perfect multikolinearitas*). Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas apabila terjadi hubungan linier yang *perfect* atau *exact* diantara beberapa atau semua variabel bebas. Akibatnya akan sulit untuk melihat pengaruh secara individu variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode VIF (*Variance Inflation Factor*).

Kriteria pengujian :

Jika  $VIF > 10$ , maka  $H_0$  ditolak

Jika  $VIF < 10$  atau *tolerance*  $< 0,10$ , maka  $H_0$  diterima

Tabel 11  
Uji Multikolinearitas

Tahun	Tolerance	VIF	Nilai Kritis	Keterangan
2009	0,833	1,075	10	Tidak ada multikolinearitas
2010	0,999	1,001	10	Tidak ada multikolinearitas
2011	0,919	1,088	10	Tidak ada multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF, nilai VIF < 10, artinya bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, karena variabel independen berjumlah lebih dari satu.

### Uji Goodness Of Fit

Uji *goodness of fit* adalah uji yang dilakukan untuk melihat kesesuaian model atau seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varian variabel terikatnya. Berikut adalah hasil perhitungan nilai R dan koefisien determinasi dalam penelitian ini.

Tabel 12  
Uji Goodness of Fit

Tahun	R	R. Square
2009	0,174	0,030
2010	0,750	0,563
2011	0,551	0,304

Sumber: output SPSS model summary

Dari tabel di atas nilai R tertinggi sebesar 0,750 pada tahun 2010 dengan koefisien determinasi 0,563 dari total variasi dependen. Variabel proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan komite audit mampu menjelaskan varians variabel dependen yang relatif tinggi, yaitu sebesar 56,3% sedangkan sisanya masih terdapat 43,7% varians variabel dependen yang belum mampu dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Hal ini dikarenakan faktor lain yang tidak termasuk di dalam penelitian. Semisal *leverage*, atau rasio antara total kewajiban dengan total aset yang menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Semakin besar utang perusahaan maka semakin besar pula risiko yang dihadapi investor sehingga investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Akibat kondisi tersebut perusahaan cenderung untuk melakukan praktik manajemen laba. Selain itu, tingkat

*leverage* yang tinggi akan meningkatkan manajemen laba untuk menghindari kemungkinan pelanggaran perjanjian utang.

Selain faktor *leverage* yang bisa mempunyai pengaruh besar terhadap manajemen laba, faktor lainnya adalah ukuran perusahaan. Seperti kita ketahui apabila semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula kesempatan manajer untuk melakukan praktik manajemen laba, dimana perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks. Selain itu, perusahaan besar juga lebih dituntut untuk memenuhi ekspektasi investor yang lebih tinggi. Selain dari kedua faktor di atas tentunya masih banyak lagi faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik manajemen laba.

### Uji F

Hasil dari perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.13  
Uji F

Tahun	F	Sig
2009	0,296	0,747
2010	12,222	0,000
2011	4,145	0,032

Apabila diperoleh nilai Sig = 0,000 < *Level of Significant* = 0,05, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima, artinya ada pengaruh secara bersama-sama pada variabel *corporate governance* terhadap manajemen laba. Dari tabel di atas nilai F tertinggi sebesar 12,222 pada tahun 2010 dengan signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen secara serentak atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

### Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali:2009). Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba secara individual dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap atau konstan.

Pengujian pengaruh variabel independen (X1, X2 dan X3) terhadap variabel manajemen laba (Y). Dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) = 5% = 0,05. Berdasarkan hasil olah data apabila diperoleh nilai Sig < *Level of Significant* = 0,05, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba (Y).

Dari hasil di atas terlihat bahwa X1 dan X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hanya X3 saja yang memiliki pengaruh signifikan

terhadap manajemen laba. Hal ini membuktikan bahwa bahwa H<sub>1</sub> (peran proporsi komisaris independen) tidak memiliki pengaruh dalam praktik manajemen laba sebuah perusahaan. Begitu juga dengan H<sub>2</sub> (peran ukuran dewan komisaris) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba perusahaan sample. H<sub>3</sub> (peran kepemilikan komite audit) yang mampu mempengaruhi manajemen laba. Hal ini dapat disimpulkan apabila perusahaan sample benar-benar mampu mengelola komite audit dengan baik maka perusahaan sample dapat menekan praktik manajemen laba yang ada.

### **Interpretasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga indikator *Corporate Governance* hanya kepemilikan komite audit (KKA) yang merupakan variabel independen yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Berarti indikator *Good Corporate Governance* lainnya yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu proporsi komisaris independen (Pki) dan ukuran dewan komisaris (UDK) bukan merupakan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Proporsi komisaris independen (Pki) dan ukuran dewan komisaris (UDK) bukan merupakan variabel yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh antara informasi asimetri terhadap manajemen laba. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Siddharta (2005) dan Ujijantho Pramuka (2007) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris tidak memiliki hubungan terhadap praktik manajemen laba. Hal ini dapat disebabkan karena : (1) pengangkatan dewan komisaris oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan, (2) ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30% mungkin belum cukup tinggi untuk menyebabkan para komisaris independen tersebut dapat mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris. Jika komisaris independen merupakan pihak mayoritas (>50%) mungkin dapat lebih efektif dalam menjalankan peran monitoring dalam perusahaan. Agar pengangkatan dewan komisaris tidak hanya sebagai pemenuhan regulasi saja, pihak regulator perlu memikirkan cara untuk lebih menyebarluaskan perlunya penegakan *Good Corporate Governance*, misalnya seperti memberikan penghargaan kepada perusahaan dengan *Good Corporate Governance* yang paling baik. Selain itu regulator juga perlu memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mengoptimalkan kerja komisaris independen. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Doddy (2007) serta Ujijanto dan Bambang (2007) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba.

Ukuran dewan komisaris (UDK) bukan merupakan variabel yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh antara asimetri informasi terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya jumlah dewan komisaris bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Akan tetapi efektivitas mekanisme pengendalian tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi (Jennings 2004a; 2004b; 2005a; Oliver, 2004 dalam Ujiyantho dan Bambang, 2007) serta peran dewan komisaris dalam aktivitas pengendalian (monitoring) terhadap manajemen (Cohen, et al.2004; Jennings 2005b dalam Ujiyantho dan Bambang, 2007). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Nasution dan Doddy (2007) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan.

Kepemilikan komite audit (KKA) merupakan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba yang berarti semakin banyak KKA maka kemungkinan adanya manajemen laba akan semakin rendah. Dengan demikian, adanya KKA sangat diperlukan dalam upaya mengurangi kemungkinan adanya manajemen laba, sehingga KKA sudah diwajibkan dalam setiap perusahaan perbankan di Indonesia. Hal ini berarti komite audit yang ada di perusahaan sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* yang mampu mengurangi tindakan manipulasi laba oleh manajemen. Dari sini dapat terlihat bahwa komite audit yang ada di perusahaan perbankan telah menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dengan menjunjung prinsip *good corporate governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan *fairness* yang pada prosesnya menghambat praktik manajemen laba dalam perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Doddy (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa keberadaan komite audit dapat menghambat terjadinya manajemen laba.

## **5. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang diukur menggunakan proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan komite audit dapat disimpulkan bahwa dua variabel pengukuran tersebut tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, hal ini dikarenakan penerapan *corporate*

*governance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sample dilakukan hanya karena untuk pemenuhan regulasi saja. Selain itu, penerapan *corporate governance* masih merupakan hal yang baru di Indonesia dan pengaruh dari penerapan *corporate governance* tersebut baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2011, penerapan *good corporate governance* yang paling baik adalah pada tahun 2009. Hal ini nampak dari tingginya prosentase dari proporsi komisaris independen (59%) dan kepemilikan komite audit (4,77) dan rendahnya *discretionary accruals* (-0,16) pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010, prosentase dari proporsi komisaris independen rendah (53%) dengan *discretionary accruals* yang tinggi (-0,26) dimana hal ini menunjukkan lemahnya pengaruh komisaris independen terhadap praktik manajemen laba yang terjadi pada tahun tersebut. Pada tahun 2011 juga tidak cukup baik, sekalipun prosentase proporsi komisaris independen meningkat (56%) namun *discretionary accruals* (-0,21) pun tetap menunjukkan angka yang tinggi.

#### **Daftar Pustaka**

- Alijoyo. Antonius dan Subarto Zaini, 2004. *Corporate governance suatu pengantar: peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporategovernance*. Jakarta: Indeks.
- Arafat. Wilson. 2012. ***Good Corporate Governance – Pedoman Komprehensif Mengukur Kinerja Penerapan GCG***. Jakarta: Penerbit Andi ISBN: 978-979-29-2431-2
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2000. Kep-SE-03/PM/2000 (Online), (<http://www.bapepam.go.id>, diakses 30 Januari 2013)
- \_\_\_\_\_. 2004. Kep-29/PM/2004. Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit (Online), (<http://www.bapepam.go.id>, diakses 30 Januari 2013)
- \_\_\_\_\_. 2004. Kep-45/PM/2004. Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik (Online), (<http://www.bapepam.go.id>, diakses 30 Januari 2013)
- Bursa Efek Jakarta,(Online), ( [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diakses 30 Januari 2013)
- Chariri, A., and Ghozali, I., 2007, *Teori Akuntansi* (trans: *Accounting Theory*), edisi ketiga Semarang: Badan Penerbit UNDIP, ISBN 979.704.014.3
- Effendi Arief, 2009. *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat .

- FCGI, 2001. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Edisi Ketiga, Jakarta. (Online), ([www.fcgi.go.id](http://www.fcgi.go.id) diakses 30 Januari 2013)
- \_\_\_\_\_, 2004. *Corporate Governance Suatu Pengantar: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Jakarta.
- Fuad. 2005. *Simultanitas Dan Trade-Off Pengambilan Keputusan Finansial Dalam Mengurangi Konflik Agensi: Peran Dari Corporate Ownership*. Simposium Nasional Akuntansi VIII, IAI, 2005.
- Gideon SB Boediono. 2005 dalam Isnanta. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governace dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi VIII.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat: Jakarta
- Indonesian Institute For Corporate Governance. 2013. (Online, [www.iicg.org](http://www.iicg.org) diakses 30 Januari 2013)
- Isnanta. 2008. *Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja*. Yogyakarta: UII.
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* 3. hal. 305-360. (Online), ([www.ssrn.com](http://www.ssrn.com) dan [http://www.docstoc.com/docs/39508628/Jensen-MC-and-WH-Meckling-\(1976\)-Theory-of-the-agency](http://www.docstoc.com/docs/39508628/Jensen-MC-and-WH-Meckling-(1976)-Theory-of-the-agency) diakses 30 Januari 2013)
- Komalasari, Puput T. 2001. *Asimetri Informasi dan Cost of equity Capital*, Simposium Nasional Akuntansi III.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, (Online), ([www.knkg-indonesia.com](http://www.knkg-indonesia.com) diakses 30 Januari 2013)
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi Revisi. Jakarta: PPM.
- Midiastuty, Pratana P., dan Mas'ud Machfoedz. 2003. *Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba*. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 6 Surabaya tanggal 16-17 Oktober 2003
- Mintara, 2008. *Pengaruh Implementasi Corporate Governance terhadap Pengungkapan Informasi*, Yogyakarta: UII.
- Nasution, Marioshot dan Doddy Setiawan. 2007. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Padget. Carol. 2012. *Corporate Governance: Theory and Practice*. Palgrave

Peraturan Bank Sentral Indonesia, 2006. No. 8/4/PBI/2006 Pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum. (Online, [www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan](http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan) diakses 30 Januari 2013)

Rahmawati. 2006. *Model Penelitian Manajemen Laba pada Industri Perbankan Publik di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perbankan*. Artikel yang Dipresentasikan pada Seminar Bulanan Jurusan Akuntansi FE-UNS tanggal 27 Mei 2006

\_\_\_\_\_, 2006. *Pengaruh Asimetri Informasi pada Hubungan antara Regulasi Perbankan dan Manajemen Laba serta Dampaknya pada Kinerja Saham*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 6 No.1 Februari: 41-54

\_\_\_\_\_ dan Zaki Baridwan. 2006. *Pengaruh Asimetri Informasi, Regulasi Perbankan, dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba dengan Model Akruwal Khusus Perbankan*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 6 No.2 Agustus: 139-150

\_\_\_\_\_, Yacop Suparno, dan Nurul Qomariyah. 2006. *Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 6 Padang tanggal 23-26 Agustus 2006

Richardson, Vernon J. 1998. *Information Asymmetry an Earnings Management: Some Evidence*. Working Paper, 30 Maret. (Online), ([www.ssrn.com](http://www.ssrn.com) diakses 30 Januari 2013)

Santoso, Singgih. 2009. *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Schipper, K. 1989. *Earnings Management*. *Accounting Horizons* 3, 91-106

Scott, R. William. 2000. *Financial Accounting Theory 2<sup>nd</sup> Edition*. Prentice-Hall, New Jersey

\_\_\_\_\_.2009. *Financial Accounting Theory 5<sup>th</sup> ed*. Toronto : Prentice Hall.

Ujiyantho dan Pramuka, 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go publik Sektor Manufaktur)*, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

Ujiyantho, Muh. Arief. dan Pramuka, Bambang Agus. 2007. *Mekanisme Good corporate governance, Manajemen laba dan Kinerja Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi IV, Bandung.

Veronica, Sylvia, dan Siddharta Utama. 2005. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)*. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 8 Solo tanggal 15 - 16 September 2005

\_\_\_\_\_ dan Yanivi S Bachtiar. 2004. *Good Corporate Governance Information Asymetry and Earnings Management*. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 7 Denpasar tanggal 2 -3 Desember 2004

Watt dan Zimmerman. 1986. *Positif Accounting Theory*.

Watts, Ross L. 2003. *Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications*. *Accounting Horizon*, Vol. 17: 207-221.

Widyaningdyah, Agnes Utari. 2001. *Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management pada Perusahaan Go Public di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 3, No. 2, November.

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.(Online), ([wikipedia.org/wiki/Bid-offer\\_spread](http://wikipedia.org/wiki/Bid-offer_spread) diakses 30 Januari 2013)

Xie, Biao, Wallace N Davidson III, and Peter J. Dadalt. 2003. *Earnings Management and Corporate Governance: The Role of The Board and The Audit Committee*. *Journal of Corporate Finance* Volume 9 Juni: 295-316